

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Ibnu Khaldun hidup pada masa antara 1332-1405, saat di mana kemunduran kaum muslimin telah mulai terjadi. Pada masa itu Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penyerangan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258.

Ibnu Khaldun tertarik untuk meneliti bagaimana berbaliknya arah gelombang peradaban Islam. Beliau menyadari bahwa berbaliknya arah gelombang ini tidak akan dapat diketahui tanpa terlebih dahulu mengambil pelajaran dari sejarah untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya suatu peradaban dan kemudian kemundurannya.

2.1. Teori Pembangunan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membangun sebuah model yang dapat menjelaskan maju dan mundurnya peradaban atau pembangunan dan kemunduran ekonomi, keduanya merupakan sebuah fenomena yang memiliki hubungan saling ketergantungan di dalam modelnya.

Model yang dibangun Ibnu Khaldun memberikan jawaban beberapa pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh ekonomi pembangunan – pertanyaan tentang mengapa banyak negara muslim yang mengalami kemajuan dengan cepat dan terus berkembang selama beberapa abad, dan mengapa kemudian sesudah itu mengalami kemunduran, bahkan sampai mengalami kolonialisasi dan sampai saat ini tidak dapat merespon tantangan yang dihadapinya.

Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan secara ilmiah prinsip-prinsip yang mengatur jatuh dan banggunya suatu dinasti, negara, atau peradaban di dalam

bukunya yang berjudul *Muqadimmah*. Prinsip-prinsip ini mencerminkan sunatullah dan hanya sebagian saja yang diidentifikasi dalam Al-Quran, sehingga perlu di elaborasi lebih jauh lagi oleh seorang ahli sejarah.

1. Model Dinamik dan Lintas Disiplin

Keseluruhan model Ibnu Khaldun dapat disarikan dalam nasihatnya kepada para sultan sebagai berikut :

“Kekuatan kedaulatan (al-mulk) tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi syariah ...;

Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (al-mulk) ;

Kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (ar-rijal);

Sumber daya manusia tidak dapat diipertahankan kecuali dengan harta benda (al-mal);

Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (al-imarah);

Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan(al-adl);

Keadilan merupakan tolak ukur (al-mizan) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia; dan

Kedaulatan mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. “

Kalimat nasihat ini terdiri dari delapan prinsip dari kebijakan politik Ibnu Khaldun. Kedelapan kalimat ini disebut “*eight wise principles*” atau kalimat *hikammiyah*. Masing-masing faktor berhubungan satu sama lain secara mutual dalam sebuah alur daur dimana permulaan dan akhir tidak dapat dibedakan.

Kalimat hikamiyyah ini mencerminkan karakter dinamik dan lintas disiplin dari analisa Ibnu Khaldun. Lintas disiplin karena tidak merujuk penyebab kemunduran peradaban pada satu faktor saja, melainkan menghubungkan semua variabel penting politik dan sosio-ekonomi seperti syariah (S), otoritas politik (G), masyarakat (N), kekayaan (W), pembangunan (g) dan keadilan (j), dalam sebuah daur perputaran interdependen, masing-masing faktor saling mempengaruhi dan pada saat yang sama juga menerima pengaruh dari faktor-faktor tersebut.

Operasi daur ini terjadi dalam sebuah reaksi berantai dalam suatu periode yang panjang setidaknya tiga generasi atau sekitar 120 tahun, maka dimensi dinamisme dapat memperlihatkan bagaimana faktor-faktor moral, psikologi, politik, sosial, ekonomi, dan demografi berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu dan membawa kepada kemajuan atau kemunduran suatu peradaban.

Dalam suatu analisa jangka panjang seperti ini, tidak berlaku klausa “*ceteris paribus*” karena tidak ada variabel yang konstan. Salah satu variabel bertindak sebagai mekanisme pemicu, variabel lain mungkin bereaksi searah pemicunya, tetapi mungkin juga tidak bereaksi. Jika variabel lain tidak bereaksi pada arah yang sama dengan pemicu, maka kerusakan di satu sektor mungkin tidak akan menyebar ke sektor lain sehingga sektor yang rusak akan tereformasi sejalan dengan waktu, dengan kata lain kemunduran suatu peradaban bisa lebih diperlambat. Tetapi jika sektor yang bereaksi searah dengan pemicunya, maka keseluruhan akan mendapat momentum melalui suatu reaksi berantai yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sulit mengidentifikasi sebab dari akibat. Daur sebab akibat ini dinamakan Daur Keadilan (*Circle of Equity*)

2. Peran Sumber Daya Insani atau Masyarakat (N)

Manusia merupakan pusat analisis Ibnu Khaldun, karena maju dan mundurnya suatu peradaban sangat berhubungan dengan kesejahteraan atau kesengsaraan masyarakat. Kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi saja, melainkan juga pada sejumlah faktor lain yang turut menentukan kualitas individu, masyarakat,

penguasa, dan lembaga-lembaga melalui sebuah proses sebab akibat selama periode yang panjang.

Manusia memiliki peranan yang penting dalam proses maju dan mundurnya peradaban. Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Manusia merupakan tujuan pembangunan karena kesejahteraan (*falah*) ditujukan bagi manusia, ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja dengan efektif dan kreatif. Manusia merupakan alat pembangunan karena pembangunan akan terjadi ketika manusia mau bekerja dan membangun. Manusia adalah input, manusia membentuk pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa para utusan Allah di tujukan untuk memperbaiki manusia dan lembaga yang mempengaruhinya. Manusia berusaha keras untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan sosial-ekonomi yang baik. Karena itu Allah berfirman :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Manusia memiliki kedudukan yang mulia dan manusia merupakan makhluk yang sempurna diantara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan Allah sendiri telah mengangkat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra:70)

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni`mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (QS. Lukman : 20)

Manusia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh

kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian pembangunan sumber daya insani haruslah mendapatkan perhatian, karena menurut penelitian Mulyaningsih (2008), pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian Mulyaningsih (2008) sejalan dengan hasil penelitian Brata (2005), yaitu variabel pembangunan sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Selain itu pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial terhadap tingkat kemiskinan.

3. Peran Pembangunan (g) dan Keadilan (j)

Jika manusia yang menjadi pusat analisis, maka pembangunan (g) dan keadilan (j) menjadi dua pengait penting dalam mata rantai sebab akibat. Pembangunan sangat penting karena kecenderungan normal dalam masyarakat tidak ingin mandeg, mereka harus terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran.

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak mengacu hanya kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain seperti G,S,N,W,j dan g dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia, dan menjamin tidak saja kelangsungan hidup melainkan juga kemajuan dalam peradaban.

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa keadilan (j) yang disini tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit tetapi dalam arti yang lebih komprehensif yaitu keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Keadilan dalam pengertian yang komprehensif ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa menciptakan suatu masyarakat yang peduli lewat persaudaraan dan persamaan sosial, dan menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang, pemenuhan secara jujur kewajiban politik

dan sosioekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja dan pencegahan kezaliman kepada siapa pun dalam bentuk apa pun.

4. Peran Syariah (S)

Syariah membantu masyarakat (N) menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya.

Dalam konsep syariah manusia akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat kelak, dimana saat hari itu tiba tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyikan. Konsep ini akan memaksa manusia untuk mengurangi cara-cara yang tidak baik dalam memperoleh kekayaan.

Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Aturan ini bisa berbentuk formal ataupun informal, tertulis atau tidak tertulis.

Syariah harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Implementasi syariah tidak akan terlaksana jika para ulama terlalu liberal atau terlalu kaku dan tidak realistis, implementasi syariah juga tidak akan terlaksana jika kekuasaan politik (G) sekuler dan korup serta tidak bersedia menjalankan perannya dalam mengimplementasikan syariah. Implementasi syariah merupakan bentuk tanggung jawab negara(G) dan masyarakat(N).

Merupakan hal yang penting bagi negara Islam (G) untuk mengupayakan agar setiap orang mengikuti ajaran syari'ah dalam urusan duniawi mereka. Negara harus mengawasi semua tingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan sosial-ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan dan ketidakadilan.

5. Peran Negara (G)

Dalam Islam, tugas pokok negara dalam bidang ekonomi adalah menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan (G) harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Ia harus toleran, moderat, dan fair, serta harus menghindari kelicikan, kecurangan, dan kepalsuan. Ia harus memenuhi semua kewajibannya, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama terhadap golongan miskin, menghapuskan ketidakadilan, dan penindasan.

Didalam Islam keterlibatan pemerintah dalam perekonomian cukup besar, hal ini dapat kita ketahui dari sejarah pemerintahan Rasulullah dan juga khalifah, pada masa itu pemerintah terlibat dalam semua ruang lingkup kehidupan termasuk ekonomi.

Sekalipun memandang negara sebagai pasar terbesar karena volume belanjanya bagi kesejahteraan rakyat, namun ia memandang tidak perlu negara terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Hal ini hanya mengurangi peluang bagi rakyat dalam menjalankan usaha mereka, justru pada gilirannya akan merugikan negara.

Negara harusnya hanya menjalankan fungsi membantu rakyat dalam menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang berbahaya dan ketidakadilan. Konsep negara yang digagas oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah negara yang menjamin berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya.

Menurut Umer Chapra (2001), kekuasaan negara dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Kekuasaan alamiah atau normal (*tabi'i*), yang membolehkan setiap orang memuaskan kepentingan pribadinya dan kesenangan hawa nafsu disebut dengan *laissez faire*.
2. Kekuasaan politik rasional (*siyasah aqliyah*) yang membolehkan setiap orang untuk memenuhi kepentingan pribadi, duniawi untuk mencegah kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional disebut juga dengan *welfare state* sekuler
3. Kekuasaan berdasarkan moral (*siyasah diniyyah* atau khilafah) yang memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan syariah disebut juga dengan *welfare state* Islami atau khilafah.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah negara berkewajiban menanggulangi kemiskinan. Ibnu Taimiyah dalam A.A.Islahi (1997) menyatakan :

"Merupakan kewajiban pemegang otoritas (imam) untuk mengumpulkan uang dari sumber manapun yang menjadi haknya (negara) dan membelanjakannya secara adil dan layak dilaksanakan dan tak pernah meniadakan hak dari mereka-mereka yang memang berhak. Sungguh merupakan perbuatan terbaik bagi pemegang otoritas untuk membedakan antara mereka yang patut menerima bantuan dan yang tak patut dan berlaku adil dalam mendistribusikan untuk tujuan kehidupan maupun urusan publik".

5. Peran Kekayaan (W)

Kekayaan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keadilan (j) dan pembangunan (g). kekayaan bergantung pada aktivitas ekonomi, luasnya pasar, insentif dan fasilitas yang disediakan oleh negara yang pada gilirannya bergantung pada tabungan atau “kelebihan sesudah pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat.” Makin besar pendapatan akan memberikan kontribusi yang kian besar pada tabungan dan makin besar investasi pada peralatan dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pembangunan (g) dan kekayaan (W).

Ibnu khaldun menekankan peran invesatasi lebih jauh seraya mengatakan “Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan, dan hak milik, dan lingkungan fisik yang sehat.

Kekayaan juga bergantung pada pembagian kerja dan spesialisasi. Makin besar pembagian kerja dan spesialisasi makin tinggi kekayaan. Namun pembagian kerja ini tidak dapat direalisasikan sehingga ada pasar yang diregulasi dengan baik yang memungkinkan semua orang memenuhi kebutuhan mereka.

Peningkatan dalam pendapatan akan memberikan kontribusi kepada peningkatan dalam penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah membelanjakan lebih besar kepada kesejahteraan rakyat. Hal ini akan memberikan peluang-peluang ekonomi dan pembangunan akan semakin berkembang. Sehingga akan mendorong pertumbuhan penduduk dan juga migrasi tenaga kerja terampil maupun tidak terampil dan kaum terpelajar ke tempat-tempat lain sehingga akan memperkuat modal intelektual dan SDM masyarakat.

Pertumbuhan jumlah penduduk akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa dan pada gilirannya akan mendorong industri, meningkatkan penghasilan, mendorong perkembangan sains dan pendidikan dan mempercepat pembangunan.

Meskipun peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan menimbulkan kemakmuran hal ini juga akan menimbulkan polusi udara dan lingkungan fisik. Pembangunan dan kemakmuran juga akan mendorong kemewahan, dan pada gilirannya akan merusak moral. Hasil-hasil pembangunan tidak dapat didistribusikan secara merata, keadaan ini akan menghapus insentif untuk bekerja dan kreativitas serta akan menurunkan tingkat kemakmuran.

Penurunan pendapatan akan menimbulkan kemerosotan di dalam penerimaan pajak, dan tidak dapat lagi mencukupi belanja pemerintah. Negara akan cenderung memaksakan pajak yang lebih tinggi dan juga akan mencoba mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap semua sumber kekayaan. Ketika pendapatan merosot, penerimaan pajak pun merosot. Negara tidak akan mampu berbelanja untuk usaha-usaha pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan akan merosot semakin dalam, kekuatan-kekuatan yang menghancurkan semakin bergerak cepat, dan pada akhirnya meruntuhkan dinasti yang berkuasa.

2.2. Kemiskinan Dalam Islam

Tujuan pokok sistem sosial-ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Sistem sosial-ekonomi Islam harus berusaha menyediakan kebutuhan minimum seluruh masyarakat, yang meliputi sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan lain yang juga harus disediakan diantaranya listrik, transportasi, biaya pernikahan, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini harus dipenuhi agar seseorang tidak terjerumus pada kemiskinan. Kebutuhan dasar ini harus disediakan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan warna kulit, ras, gender, bahkan agama.

Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menyebut orang yang tidak mampu dalam kehidupan ekonomi dengan sebutan fakir miskin. Padahal istilah fakir dan miskin memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Yusuf Qardhawi fakir ialah pihak yang membutuhkan tetapi tidak mau mengemis dan kelompok ini yang lebih berhak mendapatkan zakat. Sedangkan miskin adalah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis.

Islam telah menyatakan perang melawan kemiskinan sebagai antisipasi terhadap bahaya yang bisa ditimbulkan kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai suatu problema kehidupan. Kemiskinan akan membawa dampak negatif tidak hanya pada kehidupan tiap individu tetapi juga kehidupan sosial, termasuk pada dimensi akidah (keimanan), perilaku (Moral), pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga, bahkan kehidupan manusia secara umum.

Islam kemudian mewajibkan setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa merealisasikan kehidupan yang layak. Paling tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, ataupun pernikahan manakala sudah mampu untuk itu.

Tujuan Islam dalam mengentaskan kemiskinan adalah supaya manusia bisa beribadah kepada Allah SWT dan juga mampu mengemban beban kehidupan, serta menjaganya dari segala cengkraman sesuatu yang diharamkan termasuk tipu daya.

Kemiskinan merupakan ancaman bagi sebuah negara, karena kemiskinan merupakan akar permasalahan dari jaringan permasalahan-permasalahan besar lainnya seperti buta huruf, masalah gizi buruk, rendahnya tingkat pendidikan, kelaparan, pelacuran, bunuh diri dan bahkan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Dalam Islam kemiskinan merupakan masalah struktural. Dalam perspektif Islam kemiskinan struktural ini disebabkan oleh :

1. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam, manusia mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab. ” *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia ; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*”. (Q.S. Ar-Rum : 41). Akibat kerusakan yang terjadi di alam, manusia sendirilah yang akhirnya merasakan akibat buruknya. ”*Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak(dari kesalahan-kesalahanmu)*”. (Q.S. Asy-Syura : 30).

2. Kemiskinan timbul karena kelompok kaya yang tidak peduli pada masyarakat miskin akibat dari kebakhilan kelompok kaya. *”Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Ali Imran : 180). Akibat ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya ini maka orang – orang miskin tidak dapat keluar dari kemiskinannya.
3. Kemiskinan timbul akibat sebagian manusia yang bersikap zalim, eksploitatif, dan menindas sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan cara batil *”Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”* (Q.S. At-Taubah : 34); memakan harta anak yatim *”Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”* (Q.S. An-Nisa : 2) ; dan memakan harta riba *”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”* (Q.S. Al – Baqarah : 275).

4. Kemiskinan timbul karena konsentrasi politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu menindas rakyat Mesir di masa nabi Musa menggambarkan hal ini. *"Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan"* (Q.S. Al-Qasas : 4).
5. Kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam dan peperangan. Bencana alam menimbulkan kehilangan harta benda dan bahkan nyawa, sehingga orang yang kaya dapat menjadi miskin dan orang miskin bertambah miskin akibat bencana alam. Bencana alam juga dapat memiskinkan suatu negeri, seperti yang dialami kaum saba yang diceritakan dalam Al-Qur'an *"Sungguh bagi kaum saba ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun disebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adaalh Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Asl dan pohon Sidr"* (Q.S. Saba' : 16)

Kemiskinan dalam Islam berhubungan dengan konsep kebutuhan dasar manusia. Ada lima kelompok kebutuhan dasar manusia, yaitu (a) Agama, (b) Jiwa atau kebutuhan fisik (c) Akal atau pengetahuan, (d) Keturunan, dan (e) Harta.

Agama adalah kebutuhan dasar dan hak asasi bagi setiap individu. Setiap orang bebas mempraktikkan ajaran agamanya. Kebutuhan fisik meliputi makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Dengan kata lain kebutuhan fisik berarti segala sesuatu yang dapat membuat tubuh sehat untuk mencapai kehidupan yang bermakna.

Untuk memenuhi kebutuhan akal, Islam mengklasifikasikan pengetahuan kedalam dua jenis, yaitu pengetahuan fundamental yang harus dikuasai oleh setiap muslim dan pengetahuan spesialisasi yang boleh dikuasai oleh sedikit orang dalam masyarakat. Setiap muslim juga diharapkan memiliki keturunan agar dapat meneruskan generasi. Harta juga merupakan kebutuhan pokok manusia.

Seseorang dikatakan miskin jika ia tidak dapat memenuhi lima kebutuhan di atas. Kelima kebutuhan di atas harus terpenuhi. Jika satu saja tidak terpenuhi maka ia masih dikatakan miskin.

Kemiskinan juga berkaitan dengan konsep *nisab*. *Nisab* adalah batas minimum kekayaan dan pendapatan yang tidak terkena zakat. Bersarnya *nisab* berbeda antara jenis kekayaan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya untuk emas dan perak nisabnya masing-masing beratnya 0.3 kg dan 2.1 kg. Untuk pendapatan dan kekayaan lainnya, nilainya dikonversikan ke harga emas atau perak.

Konsep *nisab* ini telah diterima secara luas sebagai tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang yang pendapatannya tidak mencapai *nisab* tidak diwajibkan membayar zakat, bahkan mereka berhak mendapatkan zakat. Seseorang yang tidak cukup *nisab* tidak hanya bebas dari kewajiban membayar zakat tetapi juga dianggap miskin dan berhak mendapatkan zakat.

Islam memiliki dua kategori miskin, yaitu miskin dan fakir. Para ahli fikih dan tafsir berbeda pendapat tentang definisi konsep fakir dan miskin serta perbedaan keduanya. Tetapi kedua kelompok tersebut memiliki satu arti yang sama yaitu orang-orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan.

Pendapat yang lebih bisa dibenarkan, fakir adalah sebutan bagi orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak tapi tidak minta pada orang lain, sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut mayoritas ulama, orang fakir keadaannya lebih memprihatinkan dari orang miskin. Sementara ulama mendefinisikan fakir dengan orang yang

tidak memiliki apa-apa atau harta yang dimiliki tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya, tetapi tidak memenuhi kebutuhannya secara penuh.

Kaya miskinnya seseorang bukan hanya berkaitan erat dengan kaya miskinnya kerohanian atau jiwa seseorang. Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Bukanlah yang dinamakan kaya itu, karena berlimpah ruahnya harta, tetapi yang dinamakan kaya itu adalah kaya jiwa”

Atas dasar pentingnya dimensi kerohanian inilah maka Imam Al Ghozali memperkenalkan istilah fakir mutlak. Fakir mutlak merujuk pada orang yang tidak merasakan perlu kepada Allah SWT, baik itu orang kaya maupun miskin. Maka mengatasi kemiskinan berarti mengatasi masalah kemiskinan material dan jiwa sekaligus.

2.3. Penelitian Sebelumnya Yang Terkait Dengan Kemiskinan.

2.3.1. Peran Pemerintah (G) dan Kemiskinan

Studi yang dilakukan oleh Fan (2000), menginvestigasi penyebab pengurangan kemiskinan pedesaan di China. Penelitian ini terutama untuk menguji bagaimana investasi publik mempengaruhi pertumbuhan dan kemiskinan dengan mengintroduksi variabel kontrol yang berupa efek dari perubahan institusional.

Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan untuk mengestimasi berbagai efek pengeluaran pemerintah terhadap produksi dan kemiskinan melalui *channel* yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 25 provinsi dari tahun 1970-1997 yang berasal dari berbagai sumber pemerintah.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mempunyai dampak yang paling besar dalam pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan adalah sebagai strategi yang dominan. Jika dilihat

dari aspek kewilayahan, investasi mempunyai dampak yang bervariasi. Dalam upaya pengurangan kemiskinan, semua tipe investasi mempunyai dampak yang paling besar di wilayah bagian barat.

Chemingui (2007), mengevaluasi kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pengurangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi dampak dari perbedaan tipe pengeluaran pemerintah dengan sumber daya yang tersedia untuk mendapat target yang lebih baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih cepat dalam pengurangan kemiskinan.

Alat analisis yang digunakan untuk menilai efek pengeluaran pemerintah dalam merubah kemiskinan, adalah *computable general equilibrium* model (CGE). Beberapa tipe dari model menjadi alat standar untuk menilai kebijakan publik dan distribusi pendapatan secara terintegrasi. Untuk tujuan tersebut, model CGE dinamis dibangun berdasarkan skenario untuk perubahan kemiskinan dan ekonomi di Yaman selama periode 1998-2016 dalam mencari skenario alternatif yang kemudian akan diisolasi dengan dampak spesifik, kemudian model CGE digunakan untuk menilai secara detail efek skenario alternatif yang berhubungan dengan eksperimen pengeluaran publik.

Dalam melakukan eksperimen tersebut dievaluasi efek dari pengeluaran publik untuk sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan. Terlihat bahwa pengeluaran sektor publik di bidang pertanian hanya meningkatkan TFP (*total factor productivity*) di sektor tersebut saja. Sementara untuk pengeluaran publik di sektor pendidikan dan kesehatan ternyata mampu meningkatkan TFP untuk semua sektor.

Penelitian ini secara empiris menunjukkan pentingnya investasi di pelayanan sosial dalam memperbaiki modal manusia dan terutama untuk pengurangan kemiskinan selama beberapa periode ini. Pendidikan yang baik dan pemeliharaan kesehatan menolong orang miskin untuk hidup lebih produktif, meningkatkan *return* dalam investasi. Seperti halnya pertumbuhan dimana sebagian besar didorong oleh tenaga kerja dan *total factor productivity* (TFP)

termasuk modal manusia, hanya beberapa investasi untuk memperbaiki produktivitas pekerja dan TFP akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara tertentu. Pekerja yang produktif dan lebih sehat akan menolong untuk menstimulasi pembangunan sektor *private*.

Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2005), bertujuan untuk mengetahui manfaat investasi di sektor publik lokal dan pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan.

Variabel utama yang digunakan dalam penelitian adalah variabel pembangunan sosial (bidang pendidikan dan kesehatan), variabel pembangunan manusia, dan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan data panel tahun 1996, 1999, dan 2002. data kemudian diestimasi dengan menggunakan model OLS. Data panel tersebut merupakan data dari seluruh provinsi di Indonesia.

Setelah data diolah selanjutnya dilakukan estimasi. Hasil estimasi yang terpilih adalah hasil estimasi yang terbaik berdasarkan tingkat signifikansinya. Berdasarkan hal tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

2.3.2. Pembangunan (g) & Keadilan (j) dan Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2007), bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan, terhadap kemiskinan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : angka *headcount index* yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, PDB perkapita riil dalam rupiah (berdasarkan harga konstan 2000) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dan indeks gini yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Untuk menganalisis data panel tersebut menggunakan metode *pooled least square*, model efek tetap dan metode efek random. Setelah dianalisis dengan semua

metode tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih metode terbaik dengan menggunakan berbagai pengujian yaitu uji Chow, Hausman dan uji LM.

Kesimpulan dari hasil penelitian Hidayat adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketidakmerataan pendapatan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, apabila hasilnya dinikmati secara merata oleh setiap kelompok penduduk sehingga tidak mempengaruhi distribusi pendapatan akan mengurangi kemiskinan baik untuk tingkat provinsi secara keseluruhan maupun daerah perkotaan dan pedesaan.
3. Kenaikan ketidakmerataan pendapatan karena adanya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi tidaklah menjadi *trade-off* bagi pengurangan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfachri (2006) mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketidakmerataan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ketidakmerataan pendapatan antara penduduk di pedesaan dan di perkotaan, dan pengaruh perubahan pangsa pendapatan tertimbang di pedesaan dan di perkotaan serta bagaimana peranan PDB sektoral terhadap laju pertumbuhan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan data tahun 1996 – 2004, yaitu data produk domestik bruto (PDB) sektoral, produk domestik bruto (PDB) per kapita, susenas, gini rasio dan data penduduk Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis regresi dalam penelitian zulfachri adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pendapatan perkapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin.
- b. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk miskin.

- c. Sektor primer yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional.
- d. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bukan bekerja di sektor ini, akan tetapi bekerja di sektor primer dan di pedesaan, sedangkan sektor sekunder dan tersier sangat berkembang di perkotaan.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2002 memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini disebabkan pengentasan penduduk miskin tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II.

2.3.3. Sumber Daya Insani atau Masyarakat (N) dan kemiskinan

Penelitian yang dilakukan Brata (2005), yang meneliti investasi sektor publik lokal, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Berdasarkan hasil estimasi secara umum dapat dikatakan bahwa variabel pembangunan sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian pengaruh dari sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial.

Studi yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2008) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan), pembangunan manusia yang diukur dengan HDI / HPI dan kemiskinan.

Data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan antara data cross section (data seluruh provinsi di Indonesia) dan time series (data tiga tahunan yaitu tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Kemudian data dianalisis

dengan menggunakan regresi data panel. Untuk menganalisis data panel tersebut menggunakan metode *pooled least square*, efek tetap dan metode efek random. Setelah dianalisis dengan semua metode tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih metode terbaik dengan menggunakan berbagai pengujian yaitu uji Chow, Hausman dan uji LM.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia yang diukur dengan HDI berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Pembangunan manusia tersebut telah mendekati nilai – nilai Islam dalam mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu, secara umum dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena multifaktor, yang artinya kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, diantaranya akses ke pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, pembangunan sumber daya manusia, distribusi pendapatan yang adil dan merata, implementasi nilai-nilai Islam, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas di bidang pertanian, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan aset, faktor-faktor produksi dan masih banyak lagi. Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam pengentasan kemiskinan.